
STUDI KOMPARASI SUMBER PENDAPATAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN NEGARA INDONESIA

**Ananda Fitrah N¹; Kita Abilla²; Muhammad Soleh³; Riauna Selva⁴; Sri Mulya
Setianingsih⁵; Zakiyya Husna Faradisa⁶; Mohammad Rizki Fitrianto⁷**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Diponegoro

anandafitrah@students.ac.id¹; kitaabilla@students.undip.ac.id²;

muhsholeh@students.undip.ac.id³; riaunaselva@students.undip.ac.id⁴;

srimulyasetianingsih@students.undip.ac.id⁵; zakiyyahusnafaradisa@students.undip.ac.id⁶;

mochamadrizkifitrianto@lecturer.undip.ac.id⁷

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan sumber pendapatan negara Brunei Darussalam dan Indonesia, dengan fokus pada struktur ekonomi dan kebijakan fiskal masing-masing negara. Brunei yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan pendapatan per kapita. Sebaliknya, Indonesia memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam, termasuk pajak, pertanian, dan industri, meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Kata Kunci: sumber pendapatan negara, struktur ekonomi, PDB

ABSTRACT

This research discusses the comparison of revenue sources between Brunei Darussalam and Indonesia, focusing on the economic structure and fiscal policies of each country. Brunei, rich in natural resources, particularly oil and gas, makes a significant contribution to its GDP and per capita income. In contrast, Indonesia has a more diverse income base, including taxes, agriculture, and industry, although it faces challenges in revenue management and distribution. This research aims to enhance the effectiveness of economic policies in improving the welfare of the people in both countries.

Keywords: Sources of state revenue, economic structure, PDB

PENDAHULUAN

Keuangan Publik membahas tentang peran pemerintah dalam perekonomian di suatu Negara dalam hal ini berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran Negara. Menurut Sadono Sukirno, pendapatan negara adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara. Sedangkan menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh negara.

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll.

Di Indonesia pendapatan negara diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari penerimaan negara. Namun, pengembalian belanja negara tahun anggaran lalu bukan termasuk pendapatan negara.

Pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun APBN berfungsi sebagai dasar pengalokasian penerimaan

negara yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk menjalankan program pembangunan.

Setiap negara mempunyai sumber pendapatannya masing-masing tergantung dari potensi sumber daya di masing-masing negara. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi sumber pendapatan di suatu negara yaitu:

-Keseluruhan Permintaan dan Penawaran

-Investasi

-Konsumsi dan Tabungan

-Kebijakan Pemerintah

-Kemajuan Teknologi yang

Dimiliki

-Modal yang Dialokasikan

-Stabilitas Nasional

-Keterampilan dan Kompetensi

Pekerja

Berbeda dengan Negara Brunei Darussalam menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita senilai 74,953 dolar AS. Sumber kekayaan negara ini berasal dari cadangan minyak dan gas alam. Dengan cadangan sumber daya yang berlimpah, maka perekonomian negara diatur dengan baik dan mengalami pertumbuhan yang cepat. Meskipun sebagian besar pendapatan negara masih berasal dari sektor minyak dan gas, Brunei telah berupaya untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mempromosikan keberlanjutan.

Meskipun Negara Indonesia dan Negara Brunei memiliki banyak kesamaan seperti mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam, sama-sama memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan

berada dalam letak geografi dalam Asia Tenggara, tetapi dalam masalah sumber pendapatan negara antara Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Maka dari itu, peneliti ingin mendalami perbedaan tersebut dengan studi komparasi sumber- sumber pendapatan negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode Library Research, penulis melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan kajian pustaka, dengan mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Pendapatan Brunei Darussalam

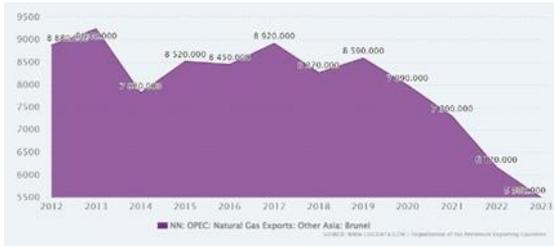
Brunei Darussalam merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam sehingga menjadikan agama yang secara resmi diakui oleh negara tersebut, meskipun demikian Brunei Darussalam tidak melarang penduduknya untuk menganut agama lain. Dalam kehidupan sosial, secara umum aturan yang lebih mendominasi adalah hukum Islam yang mana hal ini dijadikan sebagai aturan dalam bermasyarakat. (Herawati, 2018).

1. Sumber pendapatan negara Brunei Darussalam

Sumber pendapatan Brunei Darussalam Berasal dari beberapa sumber, antara lain sumber daya alam seperti minyak dan gas, perpajakan dan non pajak, prosedur diversifikasi ekonomi dan lain sebagainya.

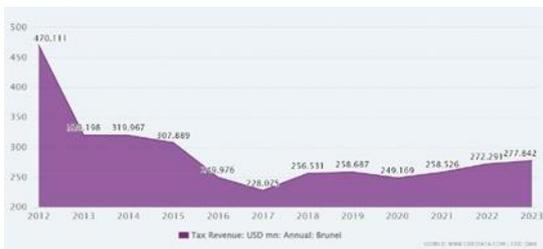
a. Sumber daya alam

Sumber daya alam negara Brunei Darussalam yang meliputi minyak dan gas menjadi sumber utama pendapatan Brunei Darussalam. Jumlah ekspor Brunei Darussalam lebih dari 90% berasal dari minyak dan gas alam. (Sari, 2019) Brunei Shell petroleum (BSP) Petroleum (BSP) pertama kali mengidentifikasi cadangan minyak di wilayah Seria pada tahun 1928. Setelah penemuan ini, minyak menjadi produk ekspor yang menguntungkan bagi Brunei Darussalam. (Subramaniam, 2016). Jepang adalah pemasok gas alam utama bagi Brunei Darussalam. Hal itu dinilai sangat menjanjikan karena gas merupakan salah satu pilar ekonomi Brunei Darussalam. Negara- negara besar seperti Jepang dan Korea Selatan sangat membutuhkan alternatif energi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak mentah. 87% pendapatan Negara Brunei Darussalam pada tahun 2009 berasal dari minyak dan gas. Ada empat perusahaan, termasuk Brunei Shell Petroleum (usaha patungan antara Royal Dutch Shell dan Pemerintah Brunei Darussalam), LNG Brunei, Brunei Cold Gas (usaha patungan antara Royal Dutch Shell, Pemerintah Brunei Darussalam, dan Mitsubishi Corporation), dan Brunei Shell Marketing, mendominasi industri minyak dan gas di Brunei Darussalam. (Herawati, 2018)



a. Perpajakan dan Non Pajak

Masyarakat tidak dikenakan pajak pribadi langsung di negara ini, meskipun pajak atas bisnis, sehingga pajak dan pendapatan bukan pajak menjadi sumber pendapatan kedua. Di Brunei Darussalam, pajak dikenakan dengan dua cara yaitu langsung, melalui pajak langsung seperti pajak penghasilan badan, dan secara tidak langsung, melalui pajak tidak langsung seperti pajak tanah, pajak konstruksi, dan pajak mobil. Selain itu, Brunei Darussalam tidak memungut pajak penjualan, pajak keuntungan modal, PPN atas produk dan jasa, atau pajak lain yang umum di negara lain (Herawati, 2018).



b. Prosedur Diversifikasi Ekonomi

Tumbuhnya diversifikasi ekonomi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang ketiga. Diversifikasi mengacu pada inovasi atau diversifikasi barang atau sektor usaha yang dianggap mampu memperkuat mesin ekonomi suatu bangsa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan perubahan harga minyak dan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja baru sebagai

akibat dari ekspansi penduduk yang cepat di Brunei Darussalam. Untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya, Brunei Darussalam secara aktif mengembangkan sejumlah bisnis, termasuk yang terkait dengan makanan, properti, barang pecah belah dan ubin, pakaian, semen, beton, obat-obatan, kayu, dan kaca (Herawati, 2018).

Selain itu, Pemerintah Brunei Darussalam juga memperhatikan industri kehutanan selain sektor industri. Hutan di Negara Brunei Darussalam memiliki banyak harapan karena negara ini terletak di dekat garis khatulistiwa. Sekitar 81% dari luas daratan Brunei Darussalam ditutupi oleh hutan. Di Brunei Darussalam terdapat berbagai jenis hutan, antara lain hutan bakau, hutan gambut, rawa, padang rumput, dan lain-lain. Meski potensi hutan sangat besar, Sultan memberlakukan kebijakan yang melarang ekspor hasil hutan, hanya penggunaan hutan untuk pemukiman yang dilakukan dengan izin pemerintah (Herawati, 2018). Selain itu, sumber pendapatan menurut kerangka keuangan publik Islam selain yang dijelaskan diatas yaitu:

a. Zakat

Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) merupakan sebuah divisi dari Departemen Agama, bertugas mengawasi administrasi zakat di Brunei Darussalam. Sesuai dengan pedoman syariah, MUIB diizinkan oleh Hukum Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, pasal 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sumbangan zakat atas nama Sultan. Bagian Penghimpunan

dan Penyaluran Zakat dibawah MUIB bertugas mengelola dana zakat. Jenis zakat yang menjadi tanggung jawab MUIB untuk dikelola yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah.

b. Wakaf

Kementerian Agama atau disebut juga Majelis Agama Islam Brunei Darussalam (MUIB) yang berlandaskan pada Hukum Negara Brunei Darussalam khususnya Akta Majlis Agama Islam dan Pengadilan Kadi Penggal 77 pasal 100, mengatur semua hal yang terkait dengan wakaf di negara tersebut.

1. Alokasi Belanja Negara

Pengalokasian pengeluaran belanja negara bersumber dari pendapatan zakat. Dalam mengontrol pengelolaan zakat di Brunei Darussalam diawasi secara langsung oleh pemerintah melalui MUIB yang meliputi beberapa departemen khusus dalam mengelola zakat, serta diatur dengan peraturan perundang-undangan. Diputuskan hanya 6 kategori di Negara Brunei Darussalam yang berhak menerima zakat, yaitu: (Jaelani, 2015):

a. Orang Fakir: orang yang tidak memiliki pendapatan atau memiliki pendapatan tetapi tidak mampu menutupi setengah dari kebutuhan pokoknya, bahkan anggota keluarga yang bergantung padanya.

b. Orang miskin: orang yang hanya memiliki sedikit pendapatan atau kekayaan yang hampir tidak memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan keluarganya, dan karena itu dia bergantung pada mereka untuk kebutuhan dasarnya. Orang miskin tidak

dipisahkan dari kelompok miskin dalam proses distribusi. Keduanya mendapatkan zakat sesuai dengan pendapatan bulanan mereka.

c. Amil: Amil telah ditunjuk oleh MUIB untuk mengumpulkan zakat atas namanya.

d. Muallaf: orang yang masuk Islam

e. Al-Gharimin: Yang Mulia Sultan Hassanal Bolkiah mengangkat pertanyaan tentang definisi gharimin pada tahun 2015 untuk memperhitungkan orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan seperti utang perumahan pemerintah. Melalui pinjaman atau pengaturan utang, pemerintah Brunei membantu warganya memperoleh rumah. Kelompok gharimin termasuk anggota masyarakat yang memiliki pinjaman untuk menutupi kebutuhan perumahan mereka.

f. Ibn al-Sabil (musafir): Orang yang membutuhkan bantuan karena tidak cukup uang yang tersedia pada saat itu dan bepergian karena alasan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Negara Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan garis batasnya di laut dengan negara-negara tetangga untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

B. Sumber-sumber pendapatan negara Indonesia

1. Pajak

Pendapatan pajak adalah iuran oleh rakyat kepada pemerintah diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pasat daerah:

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit vertikal di bawahnya. Berikut adalah jenis Pajak Pusat atau jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat:

- Pajak penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bea Meterai (BM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan.

- Pajak Provinsi
- Pajak kendaraan bermotor

- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Dan masih banyak lagi lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pemerintah perpajakan PNBP dikelola berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997. berikut yang termasuk bukan pajak:

a. Denda

Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan. Sesuai pasal 42 KUHP segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. Hal ini juga ditegaskan dalam PP 39/2016 yang memuat ketentuan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan meliputi pembayaran denda tindak pidana.

b. Retribusi

Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah tujuan dari retribusi untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapat pelayanan dari pemerintah. Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung contohnya retribusi kebersihan sampah manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.

c. Keuntungan Perusahaan Negara

Ketentuan perhitungan pajak penghasilan perusahaan diatur dalam UU No. 36

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbarui terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Subjek pajak yang berbentuk badan atau perusahaan menanggung kewajiban untuk lapor dan bayar pajak mulai dari awal mula berdiri atau sejak menjalankan bisnis di negara Indonesia.



Dari sumber data CNBC penyumbang terbesar perusahaan negara adalah BRI dengan total Rp 23,23 triliun pada tahun 2023.

d. Investasi dan aset negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Januari 2024 juga tercatat cukup baik mencapai Rp 43,3 triliun atau setara 8,8 persen dari target APBN 2024. Mengenai hal ini, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suhasil Nazara menyebut bahwa kinerja positif ini dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas seperti minyak dan batubara, diikuti dengan penerimaan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU.

Dengan hasil kinerja penerimaan hingga Januari 2024, masih on track melanjutkan kinerja positif untuk menopang arus kas negara yang mendukung realisasi belanja.

2. Alokasi Pendapatan Negara

Alokasi pendapatan negara Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terbagi menjadi beberapa sektor utama, antara lain:

1. Belanja Pemerintah

Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya. Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur.

Fungsi APBN	Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)	
	2023	2024
Pelayanan umum	863.052,90	827.706,30
Pertahanan	131.784,80	139.101,90
Ketertiban dan keamanan	175.701,60	182.802,70
Ekonomi	630.514,00	644.178,30
Lingkungan hidup	13.132,30	14.128,10
Perumahan dan fasilitas umum	31.726,50	41.798,00
Kesehatan	97.621,20	97.429,30
Pariwisata dan budaya	3.559,70	3.396,30
Agama	11.168,70	11.762,80
Pendidikan	230.728,40	225.072,80
Perlindungan sosial	241.035,20	270.151,00
Jumlah	2.230.025,10	2.467.527,50

Keterangan Data :
Sumber: Kementerian Keuangan

Seperti yang bisa dilihat dari data diatas merupakan data anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2023-2024. Pada tahun 2023 total anggaran berjumlah 2.230.025,10 dan pada tahun 2024 total anggaran yang dikeluarkan yaitu 2.467.527,50.

2. Infrastruktur

Dikutip dari laman Tender Indonesia Pemerintah mengumumkan anggaran infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 mencapai Rp 422,7 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sebesar Rp 392 triliun.

3. Sosial dan Kesehatan

Belanja negara pada RAPBN 2024 akan digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, memberantas kemiskinan absolut dan stunting, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing tinggi makan disisipkan anggaran sebanyak Rp 225.072,80, sedangkan untuk menghadirkan SDM

yang sehat dan produktif anggaran kesehatan berjumlah Rp 97.429,30.

4. Pertahanan dan Keamanan

Anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk Kemenhan pada tahun ini tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Sedangkan rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 76 Tahun 2023. Pada Lampiran III perpres tersebut, total anggaran Kemenhan ditetapkan sebanyak Rp139 triliun. Ini juga mencakup pertahanan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Jumlah anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga jenis belanja. Belanja pegawai Rp 54 triliun, barang Rp 44 triliun, dan modal Rp 40 triliun. Ada banyak aspek yang dialokasikan negara dalam belanja pertahanan. Misalnya, untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan yang terbagi dalam Rp3 triliun belanja barang dan Rp19 triliun untuk modal. Sedangkan untuk keperluan TNI, antara lain dipakai untuk markas besar TNI AD Rp58 triliun, markas besar TNI AL Rp 25 triliun, dan markas besar TNI AU Rp 18 triliun.

5. Lingkungan Hidup

Menteri LHK Siti Nurbaya melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu, (6/9/ 2023). Agenda Rapat Kerja ini mencakup R- APBN Tahun 2024 dan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024. Pada kesempatan tersebut, Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2024 sebesar Rp 7,65 T. Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan terdapat peningkatan anggaran berbasis masyarakat pada pagu anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif TA 2024 sebesar 1,56%. "Hal ini sebagai salah satu bentuk investasi KLHK terhadap modal sosial masyarakat di tingkat tapak," ujarnya. Pada Tahun 2024, KLHK mengusung tema pembangunan pada RKA K/L dan RKP K/L yaitu "Geliat Pengelolaan Hutan dari Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata". Tema tersebut akan membimbing seluruh jajaran KLHK untuk terus meningkatkan setiap kinerja positif yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel komparasi kebijakan perpajakan dan pendapatan

Berikut adalah tabel komparasi kebijakan perpajakan dan pendapatan negara antara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan beberapa indikator utama:

Indikator	Indonesia	Brunei Darussalam
Sumber Daya Alam	90% pendapatan minyak dan gas alam tidak dominan, dengan sumber lain seperti	90% pendapatan negara berasal dari minyak dan gas alam, terutama ekspor minyak

	pertanian, perikanan, kehutanan, dan tambang lain	mentah dan gas ke negara besar seperti Jepang dan Korea Selatan
Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak dibagi menjadi dua jenis: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. - Pajak Penghasilan (PPh), PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB - Pajak Kendaraan, Pajak Rokok (Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pajak pribadi langsung - Pajak untuk bisnis seperti Pajak Penghasilan Badan - Pajak tidak langsung: Pajak tanah, mobil, konstruksi - Tidak ada pajak penjualan, PPN, pajak keuntungan modal
Non Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Denda hukum, Retribusi, Keuntungan BUMN, Investasi - PNPB dari sektor non-migas dan kekayaan negara dipisahkan (aset, BLU) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan non-pajak dari zakat, wakaf, dan sumber keuangan publik Islam lainnya - Pendapatan dari sektor non-migas melalui diversifikasi

		ekonomi seperti produk makanan, tekstil, dan kayu			golongan yang membutuhkan, diawasi oleh pemerintah
Diversifikasi Ekonomi	- Terbatas, namun sedang dikembangkan melalui sektor pariwisata, teknologi, dan jasa - Pendapatan negara dominan berasal dari sumber daya alam dan sektor manufaktur	- Diversifikasi dilakukan melalui pengembangan industri makanan, properti, bahan bangunan, dan produk kayu - Pemerintah mendorong diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas	PPN/Pajak Transaksi E-commerce	- Dikenakan PPN pada transaksi e-commerce (marketplace, platform digital) - PPN atas barang digital seperti langganan online, streaming, dll.	- Tidak ada pajak PPN pada transaksi e-commerce, - Tidak ada PPN atau pajak penjualan secara umum di Brunei Darussalam
Sistem Zakat & Wakaf	Tidak menjadi bagian penting dari sumber pendapatan negara, meskipun zakat dikelola melalui Baznas	Zakat dan wakaf dikelola oleh Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB), zakat maal dan zakat fitrah dikumpulkan dan didistribusikan kepada 6	Alokasi Belanja Negara	- Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, sosial, lingkungan hidup - APBN diarahkan untuk pembangunan SDM unggul dan proyek infrastruktur utama	- Diterapkan ketat pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar melalui anggaran negara - Sistem belanja negara berbasis zakat, wakaf, dan pendapatan lain yang berlandaskan

		syariat Islam
Pengelolaan SDA (Hutan)	- Sumber daya kehutanan juga menjadi salah satu pendapatan non-pajak melalui retribusi dan pemanfaatan hasil hutan	- Ekspor hasil hutan dilarang, hanya untuk kebutuhan domestik dengan izin pemerintah - 81% wilayah Brunei merupakan kawasan hutan yang diawasi ketat oleh pemerintah untuk keberlanjutan lingkungan

SIMPULAN

Pendapatan negara memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pendapatan negara berasal dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, keuntungan BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya, yang diatur melalui APBN untuk menjalankan program pembangunan.

Brunei Darussalam, meski sama-sama berada di Asia Tenggara dengan Indonesia, memiliki perbedaan signifikan dalam sumber pendapatannya. Sumber utama pendapatan Brunei adalah minyak dan gas, meskipun negara tersebut juga berusaha melakukan diversifikasi

ekonomi. Selain itu, Brunei tidak menerapkan pajak langsung untuk individu, berbeda dengan Indonesia yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Kedua negara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi ekonomi mereka, dengan Indonesia lebih bergantung pada pajak dan pendapatan sektor lainnya, sementara Brunei bertumpu pada sumber daya alamnya

REFERENSI

- Octavia Habie, R. (2023). Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Brunei Darussalam. *Journal of Principles Management and Business*, 2(01), 28–40.
<https://doi.org/10.55657/jpmb.v2i01.104>
- Ristabet Hesda, A.(2021). Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.). Produksi barang tambang mineral-Tabel statisti. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4Izl=/produksi-barang-tambang-mineral.html>
- Kemenkeu RI. (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/i>

[Informasi-](#)
[publik/publikasi/berita-](#)
[utama/Januari-2024,-](#)
[Penerimaan-Pajak-Positif](#)

Raker Komisi IV DPR RI setuju Anggaran
KLHK tahun 2024 sebesar Rp 7,65
t.(n.d.).

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7360/raker-komisi-iv-dpr-ri-setujui-anggaran-klhk-tahun-2024-sebesar-rp-765-t#:~:text=Pada%20kesempatan%20tersebut%2C%20Komisi%20IV,2024%20sebesar%20Rp%207.65%20T>

Kehutanan, K. L. H. D. (n.d.). Progres
Rencana Kerja dan Anggaran KLHK
TA. 2024. Kementerian Lingkungan
Hidup Dan
Kehutanan.<https://www.menlhk.go.id/work-plan/progres-rencana-kerja-dan-anggaran-klhk-ta-2024/>